

Pola Hubungan Patronase dalam Birokrasi Pemerintahan Daerah Kota Bandung

Dadang Sufianto, Agus Subagyo, Agustina Setiawan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Unjani, Cimahi
E-mail: dadang.sufianto@lecture.unjani.ac.id

Abstrak—Judul penelitian ini adalah “Pola Hubungan Patronase Dalam Birokrasi Pemerintahan Daerah Kota Bandung.” Tujuannya: 1) mengetahui keberadaan pola hubungan patronase dalam birokrasi pemerintahan daerah Kota Bandung, 2) mengetahui latar belakang keberadaan pola hubungan patronase tersebut, dan 3) mengetahui dampak pola hubungan patronase terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini dirancang dengan pendekatan kualitatif. Hasilnya yaitu 1) Dalam birokrasi pemerintahan daerah Kota Bandung terdapat pola hubungan patronase antara walikota dengan para pejabat tertentu; 2) Keberadaan pola hubungan patronase tersebut dilatar-belakangi faktor politik (pilkada langsung), faktor kesamaan almamater, dan faktor kinerja pegawai; 3) Keberadaan pola hubungan patronase tidak berdampak negatif terhadap pencapaian kinerja pemda Kota Bandung. Beranjak dari kesimpulan tersebut, peneliti mengajukan konsep berupa “pola hubungan patronase dalam birokrasi pemerintahan daerah tidak berdampak negatif terhadap capaian kinerja pemerintah daerah jika kepala daerah dapat mengelolanya secara hati-hati dan normatif.”

I. PENDAHULUAN

Pola hubungan patronase dalam birokrasi pemerintahan secara teoritis sulit untuk diterima keberadaannya, karena sifatnya personal, emosional, informal, dan tidak prosedural. Pola hubungan patronase tersebut tidak sesuai dengan karakter struktur birokrasi yang memiliki pola hubungan birokratis dengan sifat hubungan antar pejabatnya yang impersonal, rasional, formal dan prosedural. Oleh karena itu, beberapa ahli berpendapat bahwa pola hubungan patronase tersebut seharusnya tidak boleh ada dalam organisasi pemerintahan (yang berstruktur birokrasi) karena dikhawatirkan dapat mengganggu kinerja. Namun, di lain pihak ada pula yang berpendapat bahwa pola hubungan patronase tersebut bermanfaat karena dapat menutupi kelemahan pola hubungan birokratis yang dirasakan kurang humanis. Dengan latar belakang tersebut, masalah pokok penelitian ini adalah “apakah pola hubungan patronase tidak mengganggu kinerja pemerintah daerah.” Karena lokasi penelitian di Kota Bandung, maka penelitian ini diberi judul “Pola Hubungan Patronase dalam Birokrasi Pemerintahan Daerah Kota Bandung.” Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

- 1) apakah dalam birokrasi pemerintahan daerah Kota Bandung terdapat pola hubungan patronase;
- 2) apa latar belakang terjadinya pola hubungan patronase tersebut; dan
- 3) apa dampak keberadaan pola hubungan patronase tersebut terhadap kinerja pemerintah daerah.
- 4) Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
- 5) mengetahui keberadaan pola hubungan patronase dalam birokrasi pemerintahan daerah Kota Bandung;

- 6) mengetahui latar belakang terjadinya pola hubungan patronase tersebut; dan
- 7) mengetahui dampak keberadaan pola hubungan patronase tersebut terhadap kinerja pemerintah daerah.

II. METODE

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan pendekatan 'kualitatif' agar peneliti dapat memperoleh gambaran dan pemahaman mendalam tentang fenomena yang diamati di lokasi penelitian. Teknik penyajian hasil penelitian yang dipilih adalah 'deskriptif-analitis,' yaitu penggambaran obyek faktual yang dianalisis secara kualitatif.

Objek penelitian adalah 'tanda-tanda pola hubungan patronase' dalam birokrasi pemerintahan daerah Kota Bandung. Sedangkan subjek penelitian adalah walikota (Ridwan Kamil) dan beberapa pejabat pemerintah daerah Kota Bandung lainnya. Jenis data yang dikumpulkan berupa data primer (dari informan) dan data sekunder (dari dokumen). Instrumen pengumpulan data adalah peneliti sendiri dengan menggunakan panduan wawancara yang dipersiapkan sebelumnya. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah wawancara, observasi, dan penelaahan dokumen.

III. HASIL DAN DISKUSI

Hubungan patronase adalah istilah lain dari hubungan patron-klien. Kausar (2009:16) mengemukakan bahwa istilah ini berasal dari bahasa Latin patronus yang berarti bangsawan dan client yang berarti pengikut. Jadi hubungan patronase pada awalnya merupakan istilah yang menunjukkan hubungan khusus antara bangsawan sebagai patronnya dengan rakyat jelata sebagai kliennya. Istilah lain yang digunakan dengan makna yang sama ialah hubungan perhambaan, yakni hubungan tuan (patron)-hamba (klien); atau hubungan pengabdian, yakni hubungan pihak yang diabdikan dengan pihak pengabdian.

Beberapa informan dari pegawai pemda eselon IV, III, dan II menerangkan bahwa pola hubungan patronase ternyata didapati pula dalam birokrasi pemda Kota Bandung walaupun keberadaannya tidak begitu mencolok seperti di daerah-daerah lainnya yang pernah dijadikan lokasi penelitian (Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat). Keterangan dari informan tersebut menguatkan pernyataan Mardiyanto sewaktu beliau menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri RI tahun 2007-2009 (dalam Kausar, 2009: ix) bahwa budaya patron-klien yang terdapat di lingkungan birokrasi pemerintahan daerah merupakan realitas yang tak dapat dipungkiri. Realitas ini terjadi secara masif di Indonesia dan sangat sulit dihilangkan.

Tanda-tanda adanya pola hubungan patronase yang mudah diketahui adalah adanya perhatian khusus walikota kepada bawahan tertentu dalam pengembangan karir. Walaupun

diketahui ada pola hubungan patronase antara walikota dengan pejabat tertentu, namun walikota dapat mengemasnya dengan baik dan disertai pertimbangan-pertimbangan obyektif dengan tatacara yang normatif. Dalam hal ini, pemberian perhatian khusus melalui pengembangan karier kliennya dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan aturan kepegawaian dan berorientasi pada kinerja. Dengan cara demikian, pola hubungan patronase yang terjadi nyaris tidak menimbulkan keaduan.

Keberadaan pola hubungan patronase dalam birokrasi pemerintahan daerah Kota Bandung dilatar-belakangi faktor kesamaan almamater, faktor politik berupa penyelenggaraan pilkada langsung, dan faktor kinerja pegawai.

Keberadaan pola hubungan patronase dalam birokrasi pemerintahan daerah Kota Bandung tidak berdampak negatif terhadap pencapaian kinerja pemda. Keadaan itu disebabkan oleh adanya system penilaian kinerja yang terprogram dengan baik disertai dengan adanya tunjangan kinerja dinamis bagi setiap pegawai yang besarnya sangat berpengaruh kuat pada semangat kerja pegawai. Misalnya, tunjangan kinerja dinamis bagi pejabat eselon IV rata-rata Rp. 16 Juta per bulan.

IV. KESIMPULAN

- 1) Dalam birokrasi pemerintahan daerah Kota Bandung terdapat pola hubungan patronase antara walikota dengan para pejabat tertentu.
- 2) Keberadaan pola hubungan patronase tersebut dilatar-belakangi faktor politik (pilkada langsung), faktor kesamaan almamater, dan faktor kinerja pegawai.

- 3) Keberadaan pola hubungan patronase tidak berdampak negatif terhadap pencapaian kinerja pemda Kota Bandung.

Beranjak dari kesimpulan tersebut, peneliti mengajukan proposisi: "pola hubungan patronase dalam birokrasi pemerintahan daerah tidak berdampak negatif terhadap capaian kinerja pemerintah daerah jika kepala daerah dapat mengelolanya secara hati-hati dan normatif."

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada:

1. Yth. Bapak Rektor Unjani dan Dekan FISIP Unjani yang telah memberikan dukungan materil dan imateril.
2. Yth. Kepala LPPM Unjani beserta para reviewer dan Staf yang telah memfasilitasi penelitian ini sehingga terarah dan sukses;.
3. Para Pegawai Pemda Kota Bandung yang telah memfsilitasi pengumpulan data yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Albrow, Martin, 1996, *Bureaucracy*, terjemahan M. Rusli Karim dan Totok Daryanto, Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.
- [2] Blau, Peter M, and Meyer, Marshall W, 1987, *Bureaucracy in Modern Society*, terjemahan Gary R. Yusuf, Jakarta: UI-Press.
- [3] Dwiyanto, Agus, dkk., 2002, *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia*, Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada.
- [4] Iver, Mc, 1992, *Jaring-Jaring Pemerintahan Jilid II*, terjemahan Laila Hasyim, Jakarta: Rineka Cipta.
- [5] Kausar, 2009, *Sistem Birokrasi Pemerintahan Di Daerah Dalam Bayang-Bayang Budaya Patron-Klien*, Bandung : Alumni.